



Perbandingan Kurikulum Pendidikan di Indonesia dan Australia: Kajian Literatur Lima Aspek Utama

Ika Kurnia Sofiani¹, Novia Ulfa², Sukma Ningsih³, Elfi Nur Amira⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Riau, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: ikur.wafie@gmail.com^{*1}, noviaulfa2003@gmail.com²,

sukmaningsih422@gmail.com³, elfinuramira@gmail.com⁴

Article received: 28 Mei 2025, Review process: 03 Juni 2025,
Article Accepted: 25 Juni 2025, Article published: 01 Juli 2025

ABSTRACT

The educational curriculum is a strategic element that shapes the learning process and determines the quality of a nation's human resources. This study aims to provide a comprehensive comparison of the educational curricula in Indonesia and Australia across five key aspects: educational goals, curriculum content, educational structure and levels, assessment systems, and teacher qualifications and competencies. This research employs a descriptive qualitative approach using literature review methods, drawing data from scholarly journals, national policy documents, international reports, and recent academic literature. The results indicate that Indonesia's curriculum emphasizes religious values, character, and nationalism, while Australia promotes flexibility, scientific approaches, and competency-based learning outcomes. In terms of assessment, Indonesia relies heavily on summative tests and national exams, whereas Australia applies ongoing formative assessment. Differences are also evident in curriculum structure and teacher qualifications, which are more standardized in Australia. These findings imply the need for Indonesia to refine its national curriculum by adopting best practices from the Australian system, particularly in curriculum flexibility, continuous assessment, and teacher professionalism, to better meet 21st-century educational challenges.

Keywords: Accreditation, Higher Education, Quality, Outcome-Based, Education Policy

ABSTRAK

Kurikulum pendidikan merupakan elemen strategis dalam mengarahkan proses pembelajaran dan menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kurikulum pendidikan di Indonesia dan Australia secara menyeluruh pada lima aspek: tujuan pendidikan, isi kurikulum, struktur dan jenjang pendidikan, sistem evaluasi pembelajaran, serta kualifikasi dan kompetensi guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, yang mengkaji sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, dokumen kebijakan nasional, laporan lembaga internasional, serta referensi akademik terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa kurikulum Indonesia lebih menekankan nilai religius, karakter, dan nasionalisme, sementara Australia menekankan fleksibilitas, pendekatan saintifik, dan hasil belajar berbasis kompetensi. Dari sisi evaluasi, Indonesia masih fokus pada penilaian sumatif dan ujian nasional, sedangkan Australia mengedepankan asesmen formatif yang berkelanjutan. Perbedaan juga terlihat dalam struktur kurikulum dan kualifikasi guru yang lebih terstandar di Australia. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penyempurnaan kurikulum nasional di Indonesia dengan

mempertimbangkan praktik baik dari sistem pendidikan Australia, terutama dalam hal fleksibilitas kurikulum, asesmen berkelanjutan, dan profesionalisme guru, agar lebih adaptif terhadap kebutuhan abad 21.

Kata Kunci: Akreditasi, Pendidikan Tinggi, Mutu, Outcome-Based, Kebijakan Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing global. Fungsi pendidikan tidak hanya mencetak individu yang berpengetahuan, tetapi juga membekali mereka dengan nilai-nilai sosial, etika, dan kultural untuk menghadapi tantangan zaman. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan berperan sebagai pilar utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengakselerasi kemajuan peradaban bangsa. Oleh sebab itu, pengembangan sistem pendidikan yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mutlak dalam merespons dinamika global saat ini.

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang memiliki posisi geografis berdekatan di kawasan Asia-Pasifik. Meski berbeda dalam struktur pemerintahan dan karakteristik budaya, kedua negara menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional. Indonesia dikenal sebagai negara dengan latar belakang religius yang kuat, sementara Australia cenderung mengadopsi pendekatan sekuler dalam sistem pendidikannya. Perbedaan ini menjadi menarik untuk ditelaah, khususnya dalam konteks kurikulum sebagai instrumen utama dalam mengarahkan proses pembelajaran.

Kurikulum merupakan dokumen terstruktur yang mencerminkan nilai, tujuan, dan arah pendidikan suatu bangsa. Melalui kurikulum, negara menetapkan standar kompetensi, pendekatan pedagogis, serta model evaluasi yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran. Dalam konteks Indonesia, kurikulum sering mengalami perubahan seiring perubahan arah kebijakan nasional, seperti yang tercermin dalam transisi dari Kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013, hingga implementasi Kurikulum Merdeka. Sementara itu, Australia cenderung konsisten dengan kurikulum nasional yang mengutamakan fleksibilitas antar negara bagian dan berbasis pada *student outcomes*.

Meski terdapat kesamaan dalam struktur pendidikan seperti pembagian jenjang sekolah dan kewajiban belajar, Indonesia dan Australia menunjukkan perbedaan signifikan dalam orientasi tujuan pendidikan, isi materi ajar, sistem evaluasi, hingga pendekatan pengembangan profesionalisme guru. Di Indonesia, pendidikan agama menjadi komponen wajib, sedangkan di Australia, pendekatan multikultural memberi kebebasan bagi siswa untuk memilih pendidikan keagamaan sesuai keyakinannya. Selain itu, standar literasi dan numerasi di Australia dinilai lebih tinggi berdasarkan hasil studi internasional seperti PISA.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perbandingan kurikulum Indonesia dan Australia, namun terbatas pada aspek tertentu, seperti pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau pengaruh kurikulum terhadap capaian PISA. Salah satunya dilakukan oleh Michie (2019) dan Wicaksono & Sayekti (2020), yang

menyoroti bagaimana pendekatan pengajaran IPA di kedua negara menunjukkan perbedaan baik dalam konten maupun metode. Namun, belum banyak kajian yang membandingkan kurikulum pendidikan secara menyeluruh, mencakup struktur tujuan, isi materi, sistem evaluasi, hingga kualifikasi guru secara sistematis lintas negara

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perbandingan kurikulum pendidikan di Indonesia dan Australia. Fokus utama mencakup lima aspek pokok, yaitu tujuan pendidikan, materi atau isi kurikulum, struktur dan jenjang pendidikan, sistem evaluasi pembelajaran, serta kualifikasi dan kompetensi guru, melalui pendekatan *literature review* terhadap berbagai sumber ilmiah dan kebijakan terkini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan pendidikan nasional Indonesia dan Australia, serta laporan lembaga internasional seperti OECD dan UNESCO. Teknik analisis data dilakukan melalui proses kategorisasi, komparasi, dan interpretasi terhadap lima aspek utama dalam kurikulum, yakni tujuan pendidikan, isi materi, struktur jenjang pendidikan, sistem evaluasi, dan kualifikasi guru. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan persamaan dan perbedaan kurikulum di kedua negara secara sistematis, mendalam, dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Kurikulum pendidikan adalah rencana atau kerangka kerja terperinci berkenaan yang ingin diajarkan terhadap siswa, bagaimana itu akan diajarkan, kapan itu akan diajarkan, dan bagaimana akan diukur atau dievaluasi. Ini adalah dokumen penting yang membimbing proses pembelajaran di beragam tingkat pendidikan, diawali pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah serangkaian rencana dan aturan tentang tujuan, materi, dan metode pengajaran yang membimbing pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, n.d.) Kurikulum pendidikan dapat ditentukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, atau organisasi pendidikan lainnya, dan sering kali merupakan hasil dari konsultasi dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Tujuannya adalah untuk memberikan arahan dan struktur bagi proses pembelajaran yang efektif, yang mendukung siswa dalam pencapaian potensi maksimal serta menjadi anggota yang berkontribusi dalam masyarakat. (Huda, 2017) Tujuan kurikulum pendidikan adalah mengarahkan proses pembelajaran agar siswa mencapai berbagai pencapaian akademik, keterampilan, dan

pengembangan pribadi yang dibutuhkan teruntuk menjadi anggota masyarakat yang berdaya serta produktif. Tujuan-tujuan ini beragam tergantung tingkat pendidikan serta konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang terkait.

Sebagai bagian yang mempengaruhi pendidikan, kurikulum bukanlah sesuatu yang tetap serta tidak bisa berubah melainkan ia bersifat dinamis. Tidak ada negara yang bisa menyempurnakan kurikulum pendidikan serta berlaku selamanya. Pada suatu saat, akan tiba waktu di mana kurikulum, meskipun disusun dengan baik, akan memerlukan perubahan atau penyempurnaan. Hal tersebut juga berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia, perubahan kurikulum terjadi seiring dengan pesat dan lajunya perkembangan zaman. Perubahan kurikulum di Indonesia terjadi melalui beberapa tahapan, antara lain melalui kurikulum tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, 2013, serta yang terbaru pada tahun 2022. (Santika et al., 2022, p. 695)

Pada saat Indonesia telah merdeka, kurikulum seringkali disebut dengan *leer plan* yang mempunyai makna rencana pelajaran dalam bahasa Belanda. Kurikulum pertama kali mulai dipergunakan pada tahun 1947, didalamnya meliputi berbagai mata pelajaran, waktu pengajaran, bahkan gambaran dan *mind mapping* materi yang akan digunakan. Akan tetapi sistem pendidikan kala itu masih sangat dipengaruhi kuat oleh para penjajah dari Jepang dan Belanda, sehingga kurikulum yang digunakan mengalami perubahan untuk melanjutkan kurikulum *Rentjana* pelajaran 1947 pada masa penjajahan Belanda, dengan berfokus pada aspek kepribadian dan karakter peserta didik. (Iramdan & Manurung, 2019, p. 90)

Setelah *Rentjana* Pelajaran 1947, pada tahun 1952, terjadi perbaikan kurikulum di Indonesia dengan nama *Rentjana* Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih rinci dalam setiap mata pelajaran dan membawa arah menuju pembentukan sistem pendidikan nasional. Salah satu aspek yang mencolok dari kurikulum tahun 1952 adalah penekanan pada relevansi konten dengan kehidupan sehari-hari. Setiap silabus mata pelajaran menegaskan bahwa satu guru mengajar satu mata pelajaran. (Alhamuddin, 2014, p. 50)

Kurikulum Indonesia pada tahun 1964 dikenal sebagai Kurikulum 1964. Kurikulum ini diperkenalkan pada era pemerintahan Presiden Sukarno dengan tujuan utama menyiapkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan bangsa. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan seimbang antara aspek akademik dan keterampilan praktis, dengan penekanan pada pengembangan kreativitas dan keterampilan hidup. Kurikulum 1964 menerapkan konsep *Pancawardhana*, yang fokus pada lima aspek perkembangan anak, yakni perkembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keterampilan, serta jasmani. Materi pelajaran disusun secara terintegrasi, tidak bisa memisahkan satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Hal ini bertujuan memberikan interpretasi yang holistik bagi siswa. Kurikulum ini juga menekankan pentingnya kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung pengembangan keterampilan dan kreativitas siswa di luar kelas. Secara keseluruhan, Kurikulum 1964 bertujuan untuk mewujudkan generasi muda yang bukan cerdas secara akademis saja, namun

mempunyai keterampilan praktis serta sikap yang siap berkontribusi pada pembangunan nasional.(Insani, 2019, p. 49)

Perubahan kurikulum kembali terjadi pada tahun 1968. Kurikulum ini ialah penyempurnaan dari kurikulum masa orde lama, menggantikan program Pancawardhana dengan pembinaan jiwa Pancasila, wawasan dasar, serta keahlian khusus. Perubahan ini sejalan dengan penerapan UUD 1945. Materi pelajaran dalam kurikulum ini bersifat teoritis dengan tujuan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, serta menjaga kesehatan fisik yang baik. Pada masa ini, peran siswa cenderung pasif, hanya menghafal teori-teori tanpa menerapkannya dalam praktek. Secara praktis, kurikulum ini lebih membentuk siswa dari segi intelektual saja.(Ananda & Hudaidah, 2021, p. 105)

Pada tahun 1973, Indonesia memperkenalkan Kurikulum tersebut, yang ialah salah satu langkah untuk upaya penyempurnaan pendidikan nasional. Kurikulum ini dibangun melalui mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta tantangan yang dihadapi bangsa pada masa itu. Secara keseluruhan, Kurikulum 1973 berusaha menciptakan sistem pendidikan yang lebih terstruktur serta komprehensif, dengan penekanan terhadap pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan generasi yang bermutu serta mempersiapkan teruntuk tantangan masa mendatang.(Aziz et al., 2022)

Pada tahun 1975, Indonesia mengadopsi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang menjadi dasar pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tujuan utama dari Kurikulum 1975 adalah untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum 1975 menekankan pendekatan terpadu dan holistik terhadap pendidikan. Ini mencakup pembelajaran akademis, keterampilan praktis, dan pengembangan karakter. Struktur kurikulum ini meliputi mata pelajaran inti berupa Bahasa Indonesia, Matematika, serta Ilmu Pengetahuan Alam, juga mata pelajaran lain berupa Seni, Pendidikan Jasmani, dan Studi Sosial. Metode pengajaran yang digunakan dalam Kurikulum 1975 cenderung lebih tradisional, dengan penekanan pada pengajaran langsung oleh guru. Namun, terdapat juga upaya untuk mengintegrasikan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif, seperti diskusi kelompok dan eksperimen praktis. Kurikulum 1975 merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, yang mencerminkan visi dan nilai-nilai pendidikan pada masa itu. Meskipun telah digantikan oleh kurikulum yang lebih baru, pengaruh dan prinsip-prinsipnya masih mempengaruhi pendidikan di Indonesia hingga saat ini.(Wahyuni, 2015, p. 237)

Kurikulum Indonesia tahun 1984 merupakan respons terhadap evaluasi yang dilakukan terhadap Kurikulum 1975. Kurikulum tersebut dianggap terlalu teoritis dan belum relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja. Kurikulum 1984 menekankan pendekatan yang lebih terpadu dan kontekstual dalam pembelajaran. Ini bertujuan untuk memperkuat keterampilan praktis siswa dan kesiapan mereka untuk terlibat dalam kehidupan masyarakat dan dunia kerja.

Kurikulum 1984 menggabungkan pendidikan umum dengan pendidikan keterampilan praktis. Ini meliputi mata pelajaran inti berupa Bahasa Indonesia, Matematika, serta Ilmu Pengetahuan Alam, juga mata pelajaran praktis berupa kerajinan, pertanian, dan tata boga. Kurikulum 1984 menekankan penggunaan metode pembelajaran yang lebih aktif serta kontekstual, berupa pembelajaran berbasis proyek serta pembelajaran praktis di lapangan.

Guru diharapkan teruntuk memfasilitasi pembelajaran yang membimbing siswa menjelajahi konsep-konsep dan keterampilan secara langsung. Kurikulum Indonesia tahun 1984 mencerminkan upaya untuk menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan praktis masyarakat dan dunia kerja. Meskipun telah digantikan oleh kurikulum yang lebih baru, pengalaman dan prinsip-prinsipnya masih dapat ditemukan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. (Wirianto, 2014, p. 143)

Kurikulum 1994 adalah penyempurnaan dari sebelumnya, bertujuan mengantisipasi kebutuhan sosial masa depan dengan menekankan keterampilan mandiri. Pendidikan difokuskan pada pembentukan karakter anak-anak dengan keterampilan yang siap digunakan di dunia kerja. Penyelenggaraan kurikulum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dengan perubahan pembagian waktu pelajaran menjadi sistem caturwulan. Kurikulum ini bersifat seragam untuk seluruh Indonesia, namun memungkinkan penyesuaian lokal. Meskipun menghadapi tantangan, Suplemen Kurikulum 1994 diterapkan untuk memperbaiki masalah yang muncul. (Asri, 2017, p. 198)

Kurikulum 1997, disebut pula menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 1997, ialah salah satu kurikulum yang signifikan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Sebagai kurikulum nasional yang diperkenalkan pada tahun 1994 dan mulai diterapkan secara penuh pada tahun 1997. Kurikulum 1997 diadopsi sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mereformasi pendidikan di Indonesia, terutama untuk meningkatkan relevansi, efektivitas, dan efisiensi pendidikan nasional. Tujuannya adalah untuk menghadirkan pendekatan pembelajaran yang lebih terfokus terhadap siswa, berorientasi mengembangkan keahlian, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kurikulum 1997 memiliki dampak yang signifikan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia pada masanya. Meskipun sejak itu telah digantikan oleh kurikulum lainnya, pengaruh dan prinsip-prinsipnya masih dapat ditemukan dalam beberapa aspek dari kurikulum pendidikan Indonesia saat ini. (Muhammedi, 2016, p. 57)

Kurikulum 2004 di Indonesia, yang dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), diperkenalkan dengan tujuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman yang semakin kompleks. Kurikulum 2004 diinginkan bisa mewujudkan lulusan dengan kompetensi yang lebih holistik, mampu berpikir kritis, kreatif, dan memiliki sikap yang baik, serta siap menghadapi tantangan global, sehingga peserta didik dapat merasakan hasilnya dalam bentuk penguasaan terhadap kumpulan keterampilan tertentu. Dalam implementasi kurikulum ini, peran siswa ditekankan kembali menjadi subjek yang aktif dalam pembelajaran, di mana mereka didorong untuk mengambil peran dalam memperoleh pengetahuan melalui diskusi. Siswa diharapkan aktif dalam mencari

informasi, sementara peran guru bergeser menjadi fasilitator yang membantu siswa dalam mendapatkan pengetahuan tersebut. (Pawero, 2018, p. 46)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 ialah kerangka kurikulum yang digunakan di Indonesia dari tahun 2006 hingga diperkenalkannya Kurikulum 2013. KTSP diperkenalkan menjadi respons kepada evaluasi akan kurikulum terdahulu yang dinilai terlalu terpusat pada pendekatan sentralistik dan kurang mengakomodasi kebutuhan lokal dan individual siswa. KTSP 2006 bertujuan mendidik secara relevan, responsif, dan berdaya kepada siswa, dengan mengakomodasi kebutuhan dan konteks lokal. Meskipun telah digantikan oleh kurikulum lainnya, beberapa prinsip dan pendekatan dari KTSP masih mempengaruhi pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Berikut adalah beberapa tujuan utama KTSP 2006: (Karli, 2014, p. 87) (a) Memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah teruntuk menyusun kurikulum menyesuaikan kebutuhan dan potensi masing-masing. Ini bertujuan agar sekolah bisa lebih responsif kepada kondisi lokal dan kebutuhan siswa, (b) Mendorong kontribusi aktif dari beragaam pemangku kepentingan, mencakup guru, siswa, orang tua, serta masyarakat dalam prosedur pengembangan kurikulum. Ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan melewati kolaborasi serta keterlibatan yang lebih luas, (c) Mengembangkan proses pembelajaran yang lebih efektif juga efisien dengan menitikberatkan terhadap pengembangan kompetensi dasar siswa. Proses pembelajaran diharapkan lebih interaktif, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, (d) Mengoptimalkan pengembangan potensi siswa secara keseluruhan, baik pada aspek wawasan, keahlian, atau sikap. Ini bertujuan mewujudkan lulusan yang kompeten serta menyiapkan teruntuk tantangan masa mendatang, (e) Memberikan fleksibilitas kepada sekolah teruntuk mengembangkan kurikulum yang menyesuaikan visi serta misi sekolah serta kebutuhan siswa, termasuk pengembangan materi muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler.

Kurikulum 2013 di Indonesia, yang menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dengan pendekatan yang lebih holistik. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis ilmiah, yang mencakup mengamati, menanya, mencoba, menalar, serta mengomunikasikan. Ini bertujuan memotivasi siswa berpikir kritis serta analitis. Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan menyeimbangkan sikap (attitude), keahlian (skills), serta wawasan (knowledge). Ini mencakup pengembangan sikap spiritual dan sosial yang menyesuaikan nilai-nilai Pancasila serta budaya Indonesia. Kurikulum 2013 diterapkan secara bertahap diawali tahun ajaran 2013/2014, dengan evaluasi dan penyesuaian yang terus dilakukan berdasarkan umpan balik dari lapangan. Tujuannya adalah teruntuk memastikan bahwa kurikulum ini bisa diterapkan dengan efektif serta berguna secara optimal teruntuk perkembangan pendidikan di Indonesia. (Machali, 2014, p. 81-82)

Kurikulum Merdeka menekankan variasi pembelajaran intrakurikuler untuk memastikan peserta didik mencapai potensi optimalnya, menguatkan konsep serta kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu. Guru diberi kebebasan teruntuk

memilih materi yang menyesuaikan kebutuhan serta minat belajar tiap siswa. Kurikulum ini juga dimaksudkan teruntuk meningkatkan pencapaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan tema yang telah ditetapkan pemerintah. Kurikulum Merdeka mengembangkan tiga aspek penting dalam diri manusia diantaranya aspek kognitif untuk meningkatkan pengetahuan tiap peserta didik, aspek fisik untuk mengembangkan keterampilan individu, aspek spiritual bertujuan untuk mengembangkan keimanan serta ketaqwaan menyesuaikan keyakinan individu siswa. (Jannah et al., 2022, p. 62)

Kurikulum Pendidikan di Australia

Departemen pendidikan melalui bagian kurikulum, biasanya bertanggung jawab atas penyusunan pedoman dan tujuan kurikulum secara umum. Setiap kurikulum pendidikan yang berlaku mengacu kepada pembentuk kurikulum itu dari pihak yang memiliki wewenang, pada sisi yang lain sekalipun sekolah swasta memiliki kebebasan yang lebih fleksibel dalam perihal kurikulum, akan tetapi kerap kali mereka juga melakukan kolaborasi terhadap kurikulum nasional yang telah diberlakukan, sehingga penyetaraan kurikulum dapat berlaku di seluruh instansi pendidikan yang ada di Indonesia.

Sistem sekolah negeri di Australia mulai pada tahun 1970 telah menunjukkan kecenderungan untuk memberikan tanggung jawab kurikulum terhadap sekolah-sekolah, namun tingkat implementasinya beragam. Sebagian negara bagian memiliki panduan kurikulum yang disusun secara terpusat, namun memberikan fleksibilitas kepada sekolah teruntuk menyesuakannya dengan kebutuhan lokal. Di negara bagian lainnya, tujuan umum ditetapkan oleh pejabat pusat, sedangkan sekolah memiliki keleluasaan dalam merinci kurikulumnya dalam kerangka tujuan tersebut. Namun, terdapat pengecualian signifikan terutama pada kurikulum kelas terakhir sekolah menengah, di mana detailnya disusun secara terpusat teruntuk ujian eksternal. Di Australian Capital Territory (ACT) dan Northern Territory, sekolah tersebut mempunyai wewenang untuk mengelola dan mengolah kurikulumnya sesuai dengan kebijakan yang ada di sekolah, agar tujuan pendidikan pada tingkat sekolah tersebut dapat terwujud. (Isri, 2015, p. 39)

Setelah masanya berakhir, berbagai pihak yang menggeluti bidang pendidikan menyepakati untuk melakukan perombakan terhadap kurikulum yang sebelumnya, perihal ini bertujuan menemukan pembelajaran yang baik serta sejalan dengan perkembangan zaman. Beberapa langkah-langkah strategis dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seperti menentukan kurikulum utama, beberapa tingkatan sekolah memiliki pokok-pokok pelajaran alternatif yang telah ada, namun perihal ini memiliki keterkaitan pula dengan kejuruan dan digitalisasi. Pemerintah Commonwealth mendirikan Pusat Pengembangan Kurikulum (CDC) pada tahun 1975 untuk membantu mengkoordinasikan, menyebarkan, dan menyusun materi kurikulum. Buku-buku yang akan digunakan dalam proses pembelajaran telah dipersiapkan dari berbagai lembaga penyusun kurikulum maupun departemen pendidikan, penerbitan ini bertujuan agar materi

pembelajaran dapat terbagi sesuai dengan porsinya masing-masing dan tidak bercampur aduk.

Pada tahun 2000, proses penyusunan kurikulum di Australia melibatkan kerja sama antara pemerintah federal dan negara bagian/teritori serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Pemerintah Australia telah bekerja sama dengan negara bagian dan teritori untuk mengembangkan Kerangka Nasional Kurikulum (National Curriculum Framework) yang memberikan panduan umum tentang standar dan struktur kurikulum di seluruh Australia. Proses penyusunan kurikulum melibatkan pemerintah federal bersama negara bagian dan teritori, dengan tujuan menyelaraskan kurikulum di seluruh Australia dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan lokal. Terdapat mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan terkini dalam pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Melalui proses ini, kurikulum yang dihasilkan pada tahun 2000 diharapkan dapat memenuhi standar yang tinggi dan mempersiapkan siswa Australia untuk menjadi anggota produktif dalam masyarakat global yang semakin kompleks. (Suyadi, 2020, p. 433)

Pengembangan kurikulum di Australia adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan terstruktur, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan. Pengembangan kurikulum di Australia adalah upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi semua siswa. Dengan pendekatan terpadu, konsultatif, dan berkelanjutan, kurikulum Australia berusaha untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di Australia melibatkan semua pihak yang terlibat, berdasarkan pada *Curriculum Frameworks* (Australian Bureau of Statistics, Schools, Australia 1993, 1993, p. 8) dan *link across the curriculum*. (D' Cruz J & P. Langford (Eds.), n.d., p. 88) *Curriculum Framework* tidak menggunakan istilah berbasis kompetensi atau *competency-based*, namun mengadopsi istilah *student outcomes statement* atau yang dikenal sebagai *overarching statement learning outcomes*. Pada dasarnya, rumusan ini serupa dengan konsep kompetensi. (Saifullah, 2014, p. 279)

Curriculum Framework mencakup beberapa aspek menarik. Ada 8 kondisi yang melatarbelakangi pengembangan kurikulum di Australia, yaitu: (1) *Cultural Diversity* (Keragaman Budaya), (2) *Changes in The Family Structure* (Perubahan Struktur Keluarga), (3) *Rapid Pace of Technological Change* (Langkah Cepat Perubahan Teknologi), (4) *Global Environmental Issues* (Isu Lingkungan Global), (5) *Changing Nature of Social Conditions* (Mengubah Sifat Kondisi Sosial), (6) *Change In the Workplace* (Perubahan di Tempat Kerja), (7) *Inter-Dependence in The Global Economy* (Ketergantungan Ekonomi Global), (8) *Uncertain Standards of Living* (Standar Ketidakpastian Hidup).

Guru dan sekolah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menentukan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa mereka. Guru di Australia didorong untuk menjadi pembuat keputusan yang

mandiri dalam merancang dan mengimplementasikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa mereka. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih strategi pengajaran yang paling cocok untuk memfasilitasi pemahaman siswa dan mencapai tujuan pembelajaran. Guru memiliki tanggung jawab untuk memahami kebutuhan dan gaya belajar individu siswa mereka. Dengan memahami perbedaan dalam kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran mereka untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapat kesempatan untuk berkembang secara optimal. Guru di Australia diharapkan untuk menggunakan berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan konten pelajaran dan tujuan pembelajaran.

Sekolah mendukung kolaborasi antar guru untuk berbagi pengalaman, ide, dan praktik terbaik dalam pengajaran. Kolaborasi ini dapat terjadi melalui pertemuan staf, workshop, pelatihan, atau platform online yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan. Guru bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang mereka gunakan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, mereka dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam pengajaran mereka untuk meningkatkan pemahaman dan prestasi siswa. Sekolah memberikan dukungan dan sumber daya kepada guru untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan efektif. Dengan memberikan kemandirian kepada guru dan mendukung sekolah dalam mengadopsi pendekatan pembelajaran yang beragam dan responsif, pendidikan di Australia bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang merangsang dan inklusif bagi semua siswa.

Perbandingan Kurikulum Pendidikan di Indonesia dan Australia

Kurikulum pendidikan di Indonesia dan Australia memiliki beberapa perbedaan signifikan, terutama dalam pendekatan, struktur, dan implementasi. Berikut adalah perbandingan di antara keduanya.

1. Tujuan

Tujuan pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 adalah memastikan bahwa pendidikan dimulai dari individu dalam keadaan sebagaimana adanya (aktualisasi), mengakui potensi yang ada dalam individu (potensialitas), dan mengarahkannya menuju realisasi menjadi individu yang sesuai atau yang diharapkan (idealitas). Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah menciptakan manusia yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, empatik, memiliki kemauan dan kemampuan untuk berkarya, dapat memenuhi kebutuhan secara proporsional, mengendalikan hawa nafsunya, memiliki kepribadian yang baik, berkontribusi dalam masyarakat, dan memiliki keberagaman dan kebudayaan yang kaya. Dalam konteks ini, pendidikan harus berperan dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki manusia secara menyeluruh dan terintegrasi, termasuk dalam dimensi keberagaman, moralitas, individualitas, sosialitas, dan kebudayaan. (Sujana, 2019, p. 31)

Pendidikan di Indonesia memberi prioritas pada pengembangan sikap sosial dan religius dalam praktiknya. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, terutama sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap dimensi spiritual dan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, tidak diragukan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang sangat religius.

Tujuan umum pendidikan di Australia dirumuskan dengan mempertimbangkan kompromi dari berbagai pihak, termasuk negara bagian, lembaga-lembaga pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah, serta para akademisi. Semua ini bertujuan untuk mengembangkan layanan pendidikan yang memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran, Australia memisahkan tujuan pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan yang telah diatur dalam undang-undang. Pada tingkat sekolah, pendidikan diarahkan pada pengembangan potensi siswa, sementara pada tingkat perguruan tinggi, fokusnya lebih pada mencapai kebutuhan atau kepentingan ekonomi atau masyarakat secara keseluruhan. (Arifin, 2020, p. 43-56)

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Australia sangat memperhatikan perbedaan pencapaian tiap peserta didik berdasarkan usia, tingkat pendidikan, dan kebutuhan individual mereka. Pada masa anak-anak hingga remaja, fokus utama adalah pengembangan identitas diri mereka, sementara pada saat dewasa dan siap memasuki dunia kerja dan masyarakat, mereka telah disiapkan secara mental dan pengetahuan sehingga mampu menjadi individu yang kompeten di bidangnya masing-masing. Berbeda dengan pendidikan di Indonesia yang menekankan sikap religius sebagai fokus utama, pendidikan di Australia tidak memasukkan agama sebagai tujuan utamanya.

2. Isi/ Materi

Konten atau materi pelajaran dalam kurikulum adalah bagian yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman belajar yang diperlukan oleh siswa. Ini mencakup berbagai bidang studi yang diajarkan serta isi program untuk setiap bidang studi tersebut. Jenis bidang studi ditentukan berdasarkan apakah mereka mendukung tujuan institusional sekolah yang bersangkutan. Oleh karena itu, Penetapan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dan teori pendidikan yang telah dihasilkan. (Sukmawati, 2021)

Sedangkan Pendidikan di Australia, fokus pendidikan pada bidang-bidang yang memberikan siswa pendidikan menyeluruh dan membangun keterampilan sosial. Setiap sekolah yang menerima siswa internasional akan menyelenggarakan pengajaran dalam 8 bidang pembelajaran penting yaitu: Seni, Bahasa Inggris, Pendidikan Kesehatan dan Jasmani, Bahasa Lain selain Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan, Kajian Penduduk dan Lingkungan, dan Teknologi. (Batubara, 2021, p. 27)

Selain itu, siswa memiliki pilihan luas dalam mata pelajaran tambahan yang menjamin keberagaman pendidikan di Australia. Sebagai contoh, mereka memiliki pilihan antara berbagai mata pelajaran seperti teknologi informasi,

ekonomi, hukum, pertanian, psikologi, seni peran, desain grafis, penerbangan, dan bidang lainnya.

Dalam konteks pembelajaran bahasa, Australia adalah salah satu negara yang menerapkan program kreatif seperti pembuatan film pendek, penulisan buku, presentasi, pembuatan film dokumenter berbahasa Spanyol, proyek Graffiti, pendekatan pengalaman bahasa, dan proyek surat kabar di pendidikan dasar. Di tingkat pendidikan tinggi, program-program seperti pembuatan aplikasi web, English for specific purposes, pembelajaran bahasa, dan pertukaran bahasa juga dijalankan. Semua ini memberikan pengalaman tambahan dan mendorong kreativitas dalam pembelajaran bahasa. (Iskandar et al., 2023, p. 19)

Dilihat dari kerumitan dan tingkat kesulitan materi pembelajaran, standar pendidikan dasar di Indonesia dianggap lebih tinggi dibandingkan di Australia. Siswa kelas dua di Indonesia sudah menyelesaikan lebih dari empat mata pelajaran dengan tugas-tugas rumit dan ujian-varian. Namun, di Australia, siswa kelas satu dan dua tidak diwajibkan untuk mempelajari keterampilan membaca. (Marmoah et al., 2021, p. 789) Perbedaan lainnya adalah terkait dengan pendidikan agama. Di Indonesia, pendidikan agama wajib di setiap jenjang, sedangkan di Australia, pendidikan agama bukanlah kewajiban universal. Penyesuaian terhadap latar belakang multikultural Australia, di mana siswa memiliki kesempatan untuk memilih untuk belajar agama sesuai dengan keyakinan mereka di sekolah swasta yang menyediakan pendidikan agama seperti Katolik dan Islam.

3. Struktur dan Jenis Pendidikan

Negara-negara berkembang di berbagai bagian dunia umumnya memiliki dua jenis pendidikan utama: pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Pendidikan umum bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang umum, sementara pendidikan kejuruan bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki keterampilan khusus sesuai dengan bidangnya. Pendidikan umum meliputi pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar kepada peserta didik sehingga mereka siap untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. (Rembangsupu et al., 2022, p. 94)

Sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi tiga tingkatan utama: pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan tahap awal dalam sistem pendidikan formal di Indonesia yang terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pendidikan menengah melanjutkan pendidikan dasar dan mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi atau dunia kerja yang terdiri dari sekolah menengah atas dan kejuruan. Pendidikan tinggi merupakan tahap akhir dalam sistem pendidikan formal di Indonesia, yang meliputi pendidikan akademik, vokasional, dan profesional. Pendidikan tinggi di Indonesia diselenggarakan oleh berbagai institusi, termasuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi, baik negeri maupun swasta. Universitas-universitas terkemuka di Indonesia seringkali memiliki reputasi yang baik dan menarik mahasiswa dari seluruh negeri. Sistem

pendidikan di Indonesia diatur dan diawasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar pendidikan, kurikulum, dan kebijakan pendidikan nasional.

Sedangkan tahun ajaran baru di Indonesia di mulai pada bulan Juli. Sebelum tahun 1979, tahun pelajaran baru di Indonesia biasanya dimulai pada bulan Januari, dengan anak-anak memulai sekolah tidak lama setelah pergantian tahun. Tahun ajaran tersebut berakhir pada bulan Desember pada tahun yang sama. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Daoed Joesoef mengimplementasikan berbagai kebijakan baru, termasuk terkait awal tahun pelajaran baru. Daoed menetapkan bahwa tahun pelajaran yang sebelumnya dimulai pada bulan Januari harus dimundurkan menjadi bulan Juli.

Sistem pendidikan Di Australia mulai dengan kindergarten dan berlanjut dari kelas 1 hingga kelas 12. Struktur pendidikan di Australia dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan utama: (1) Primary School (Sekolah Dasar), yang meliputi taman kanak-kanak hingga kelas 6 atau 7, bergantung pada negara bagian. (2) Secondary or High School (Sekolah Menengah), dari kelas 7 atau 8 hingga kelas 10, juga tergantung pada negara bagian. (3) Vocational Education and Training (Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan), dan Senior High School Secondary School College (Sekolah Menengah Atas), yang berlangsung dari kelas 11 hingga kelas 12. (4) Tertiary Education (Pendidikan Tinggi), yang mencakup universitas.

Struktur dan jenis kurikulum pendidikan di Indonesia dan Australia memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan. Kurikulum 2013 (K13) adalah salah satu kurikulum terbaru yang digunakan sebagai landasan pendidikan di Indonesia. K13 mengikuti struktur pendidikan dasar yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu pendidikan dasar (SD), pendidikan menengah pertama (SMP), dan pendidikan menengah atas (SMA). Struktur kurikulum Indonesia cenderung lebih terpusat pada pembelajaran akademik dan penguasaan materi pelajaran. Sedangkan Kurikulum di Australia didasarkan pada Australian Curriculum yang berlaku secara nasional. Australian Curriculum mencakup kurikulum yang komprehensif untuk pendidikan dasar dan menengah, serta menyediakan standar pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa di berbagai mata pelajaran. Struktur kurikulum di Australia memiliki fokus yang lebih luas, termasuk pengembangan keterampilan lintas mata pelajaran.

Pendidikan di Indonesia dan Australia memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, termasuk struktur, sistem, dan pendekatan pembelajaran. Perbedaan utama antara jenis pendidikan di Indonesia dan Australia terletak pada struktur, jenjang usia siswa, dan fokus pendidikan. Meskipun keduanya memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa, implementasi dan pendekatan pembelajarannya dapat bervariasi berdasarkan konteks budaya, sosial, dan politik masing-masing negara.

4. Evaluasi

Perbandingan evaluasi Kurikulum Pendidikan antara Indonesia dan Australia dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk struktur kurikulum, metode pengajaran, fokus pembelajaran, dan hasil yang diharapkan. Ini merupakan bagian dari strategi penguatan yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan keterampilan yang diinginkan, seperti etos kerja yang tinggi, disiplin, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, model evaluasi harus holistik, kontinu, dan obyektif. (Soedijarto, 2012) Kegiatan asesmen nasional dibagi menjadi tiga tahap, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. (Muta'ali, 2020)

Kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan, namun beberapa elemen inti seperti Kurikulum 2013 (K13) masih menjadi landasan. K13 menekankan pada pendekatan tematik dan kompetensi, dengan penekanan pada pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum di Australia didasarkan pada Australian Curriculum yang menguraikan standar pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa di berbagai mata pelajaran. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan keterampilan lintas mata pelajaran. Pengajaran di Indonesia cenderung lebih tradisional dengan fokus pada pengajaran langsung oleh guru. Namun, terdapat upaya untuk mengintegrasikan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif. Pendekatan pembelajaran di Australia cenderung lebih inklusif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Guru di Australia mendorong diskusi, eksperimen, dan proyek kolaboratif untuk mendukung pembelajaran aktif.

Kurikulum di Indonesia cenderung memiliki fokus yang lebih teoritis dengan penekanan pada penguasaan materi akademik. Kurikulum di Australia menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kerja tim. Evaluasi di Indonesia seringkali diarahkan untuk mengukur penguasaan materi akademik. Ujian nasional dan ujian sekolah menjadi bagian penting dari evaluasi. Evaluasi di Australia lebih beragam dan inklusif, termasuk penilaian formatif dan sumatif, serta penilaian keterampilan non-akademik seperti keterampilan sosial dan keterampilan hidup. Dalam keseluruhan, perbedaan utama antara kedua negara terletak pada pendekatan pembelajaran, fokus pembelajaran, dan evaluasi. Sementara Indonesia lebih terfokus pada penguasaan materi akademik, Australia lebih menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 dan kesiapan siswa menghadapi tantangan masa depan.

5. Kualifikasi dan Kompetensi Guru

Sebelum memasuki dunia pendidikan, setiap tenaga pendidik di Indonesia harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan baik dari segi kemampuan dan keterampilannya dalam mendidik anak muridnya. Hal ini dikarenakan adanya hubungan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berkualitas. Kualifikasi akademik menyangkut strata pendidikan sarjana dari pendidik itu sendiri, sedangkan kompetensinya meliputi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional yang harus dipenuhi sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas. (Jahidi, 2014, p. 24-27)

Dalam hal kualifikasi pendidik (guru), pada tahun 2008, *Department of Education and Training Government of West Australia* menetapkan bahwa minimal kualifikasi akademik untuk mengajar di tingkat sekolah dasar adalah diploma, sementara untuk sekolah menengah, terutama untuk sekolah negeri, dibutuhkan gelar sarjana. Namun, untuk sekolah swasta, mereka memiliki kebebasan untuk mempekerjakan guru tanpa memperhatikan tingkat kualifikasi mereka. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sebagian besar guru di sekolah swasta di Australia Barat memiliki kualifikasi sarjana dalam bidang kompetensi pendidikan. (Mawardi, 2014, p. 3-4) Ada tiga aspek kompetensi yang dimiliki oleh guru, yaitu *professional atributs* (kompetensi yang melekat pada diri guru profesional), *profesional knowledge* (kompetensi pengetahuan profesional) dan *profesional practice* (kompetensi praktis profesional).

SIMPULAN

Kesimpulan, kurikulum pendidikan di Indonesia dan Australia memiliki karakteristik yang berbeda dalam lima aspek utama, yaitu tujuan, isi, struktur, evaluasi, dan kompetensi guru. Kurikulum Indonesia cenderung menekankan nilai-nilai religius, nasionalisme, dan penguatan karakter, sementara Australia lebih menekankan pendekatan saintifik dan hasil belajar berbasis kompetensi. Dalam aspek isi, Indonesia masih menghadirkan materi yang padat dengan beban administrasi tinggi, sedangkan Australia lebih fleksibel dan kontekstual. Struktur jenjang pendidikan Indonesia lebih seragam secara nasional, sementara Australia memberi otonomi kepada masing-masing negara bagian. Sistem evaluasi di Indonesia lebih banyak menekankan ujian nasional dan penilaian sumatif, sedangkan Australia mengutamakan asesmen formatif yang berkelanjutan. Adapun dalam aspek kompetensi guru, Australia menetapkan standar sertifikasi profesional yang ketat dan terukur, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan kualitas guru. Oleh karena itu, temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum nasional dengan mempertimbangkan praktik baik dari sistem pendidikan negara lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA). (2019). *The Australian Curriculum*. <https://www.australiancurriculum.edu.au/>
- Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL). (2020). *Australian professional standards for teachers*. <https://www.aitsl.edu.au/teach/standards>
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2010). *Paradigma pendidikan nasional Abad XXI*. BSNP Press.
- Cahyadi, A. (2020). Perbandingan kurikulum pendidikan antara Indonesia dan negara lain. *Jurnal Pendidikan Global*, 4(2), 120–133. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xyz456>
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.

-
- Kemendikbud. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Khoirunnisa, U. (2021). Implementasi Kurikulum 2013 di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 8(1), 45–54.
- Michie, M. (2019). Comparing science curricula: Indonesia and Australia. *Asia-Pacific Science Education*, 5(4), 234–250. <https://doi.org/10.1186/s41029-019-0041-3>
- OECD. (2019). *PISA 2018 Results (Volume I): What students know and can do*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (2017). *Kurikulum 2013: Struktur kurikulum dan kompetensi inti*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rahmawati, L. (2021). Kurikulum pendidikan karakter di Indonesia dan Australia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 10(2), 112–121.
- Rokhman, F., Syaifudin, A., & Yulianti, M. (2014). Character education for golden generation 2045 (national character building for Indonesian golden years). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 141, 1161–1165. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.197>
- Sari, N. P. (2022). Evaluasi pendidikan di Indonesia dan Australia: Studi perbandingan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 13(3), 201–212.
- UNESCO. (2021). *Education for sustainable development: A roadmap*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802>
- Wicaksono, H., & Sayekti, I. C. (2020). Perbandingan kurikulum IPA sekolah dasar di Indonesia dan Australia. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sains*, 4(1), 33–40.